

BAB II

GAMBARAN UMUM

Bab ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai objek penelitian melalui adanya gambaran dan informasi lebih mendalam mengenai objek penelitian yang terbagi menjadi 3 sub yaitu gambaran umum daerah Kota Semarang dan gambaran umum instansi terkait yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai objek penelitian serta Gambaran mengenai Inovasi Lek Paijo.

2.1. Gambaran Umum Daerah Kota Semarang

2.1.1 Aspek Geografis

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dimana secara geografis Kota Semarang terletak diantara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur.⁵¹ Kota Semarang memiliki posisi geostrategis dimana berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Berdasarkan data BPS Kota Semarang menunjukkan bahwa Kota Semarang secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Semarang di sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah Barat, serta berbatasan dengan Kabupaten Demak di sebelah Timur.⁵²

⁵¹ <https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil> Diakses pada tanggal 19 Desember 2020, Pukul 08.15

⁵² <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/3/letak-geografis-kota-semarang.html> Diakses pada tanggal 19 Desember 2020, Pukul 08.20

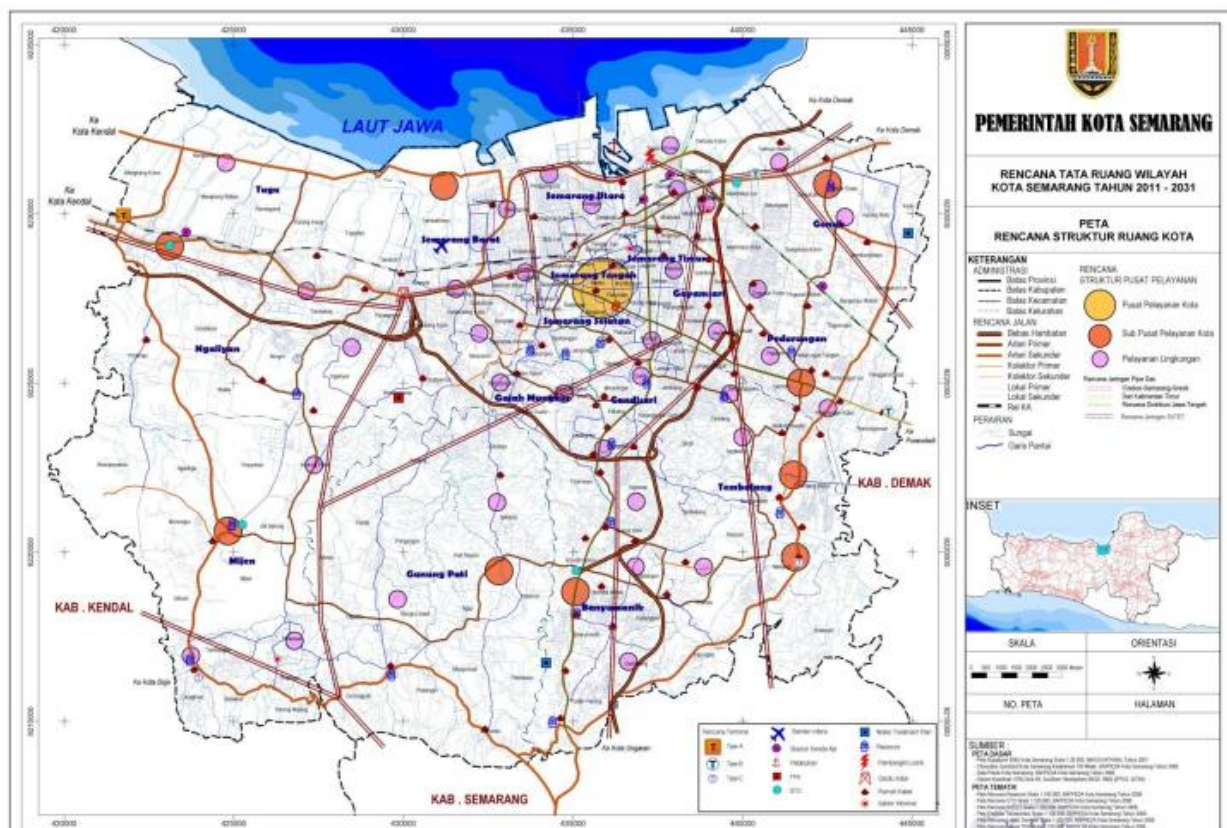
Tabel 2.1

Letak Geografis Kota Semarang

NO	Batas wilayah	Letak Lintang	Keterangan
1	Sebelah Utara	6° 50' LS	Laut Jawa
2	Sebelah Selatan	7° 10' LS	Kab. Semarang
3	Sebelah Barat	109° 50' BT	Kab. Kendal
4	Sebelah Timur	110° 35' BT	Kab. Demak

Gambar 2.1

Peta Kota Semarang



Sumber : RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kota Semarang terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pantai. Dataran rendah di Kota Semarang berada di kawasan wilayah bagian Tengah dengan kemiringan 2– 15%, Dataran tinggi di Kota Semarang bagian Selatan dengan kemiringan 15-40%, serta untuk dataran pantai berada di kawasan bagian Utara dari Laut Jawa dengan kemiringan 0-2%.

Kota Semarang memiliki iklim daerah tropis dengan pergantian musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi antara bulan Oktober - Maret sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April - September. Dengan curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm, dan suhu udara di Kota Semarang sekitar 23 C hingga 34 C.

2.1.2 Luas Wilayah

Secara administratif, Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² yang terbagi atas 16 kecamatan yaitu Kecamatan Mijen, Gunung Pati, Banyumanik, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan. Jika dilihat dari kecamatan, kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Mijen yaitu 57,55 km² dan Kecamatan Gunung Pati 54,11 km². Sedangkan untuk kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan

Semarang Selatan yaitu 5,92 km² dan Kecamatan Semarang Tengah yaitu 6,14 km² .

Kota Semarang tidak hanya terbagi menjadi 16 Kecamatan, tetapi juga terdiri dari 177 kelurahan. Menurut data terakhir BPS Kota Semarang, bentuk penggunaan luas lahan di Kota Semarang terbagi menjadi 9 sub bagian diantaranya yang pertama penggunaan Sawah dimana mencapai 3.701,30 ha, kedua digunakan untuk Tegalan/kebun seluas 7.538,70 ha, ketiga untuk Ladang/Huma seluas 686,40 ha, keempat digunakan untuk Perkebunan seluas 814,00 ha, Kelima yaitu digunakan untuk Ditanami Pohon yaitu seluas 1.418,60 ha, Keenam yaitu Padang Pengembalaan/Rumput seluas 481,60 ha, dan Ketujuh yaitu Tambak/Kolam/Empang seluas 4.633,84 ha, dan yang terakhir digunakan untuk Jalan/ Pemukiman/Perkantoran/Sungai yaitu seluas 17.765,23 ha.

Jika dilihat maka rata-rata Kota Semarang penggunaan lahan digunakan untuk yang pertama Jalan/Pemukiman/Perkantoran/Sungai, sedangkan untuk posisi kedua digunakan untuk Tegalan/kebun.

Tabel 2.2**Luas Wilayah Kecamatan dan Kota Semarang**

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1.	Mijen	57,55
2.	Gunungpati	54,11
3.	Banyumanik	25,69
4.	Gajah Mungkur	9,07
5.	Smg. Selatan	5,92
6.	Candisari	6,54
7.	Tembalang	44,2
8.	Pedurungan	20,72
9.	Genuk	27,39
10.	Gayamsari	6,177
11.	Semarang Timur	7,7
12.	Semarang Utara	10,97
13.	Smg. Tengah	6,14
14.	Semarang Barat	21,74
15.	Tugu	31,78
16.	Ngaliyan	37,99
Kota Semarang		373,7

Sumber : BPS Kota Semarang 2020

2.1.3 Kondisi Demografis Kota Semarang

Kota Semarang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 1.814.110 yang terdiri dari 889.298 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 924.812 ribu jiwa penduduk perempuan dengan mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,57%. Jika dilihat melalui data bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Hal ini tidak menunjukkan perubahan dari tahun-tahun sebelumnya dimana memang proporsi dari jumlah penduduk perempuan lebih mendominasi atau lebih banyak dengan rasio jenis kelamin sebesar 96%. Hal ini berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96% penduduk laki-laki. Dapat dilihat melalui tabel mengenai Jumlah Penduduk Kota Semarang tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2019

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
Mijen	38.099,00	37.938,00
Gunungpati	58.956,00	59.804,00
Banyumanik	80.590,00	84.363,00
Gajahmungkur	30.190,00	30.489,00
Smg. Selatan	33.461,00	37.061,00
Candisari	37.578,00	39.279,00
Tembalang	103.695,00	105.809,00
Pedurungan	106.235,00	108.453,00

Genuk	59.589,00	59.421,00
Gayamsari	41.113,00	41.923,00
Smg. Timur	34.936,00	40.836,00
Smg. Utara	58.161,00	61.486,00
Smg. Tengah	28.228,00	32.874,00
Smg. Barat	80.312,00	84.736,00
Tugu	16.633,00	16.700,00
Ngaliyan	81.521,00	83.650,00
Kota Semarang	889.298,00	924.812,00

Sumber : BPS Kota Semarang 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk tahun 2019 menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Jika dilihat berdasarkan sebaran kecamatan, penduduk dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Pedurungan dengan jumlah penduduk sebesar 214.688 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 106.235 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 108.453 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Tugu dengan jumlah penduduk sebesar 33.333 jiwa yang terdiri atas 16.633 jiwa penduduk laki-laki dan 16.700 jiwa penduduk perempuan.

2.1.4 Kondisi Perekonomian Kota Semarang

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah yang juga sekaligus merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia hal ini menunjukkan bahwa kota Semarang memiliki pembangunan daerah yang maju. Salah satunya melalui pembangunan dalam ekonomi. Pembangunan dalam ekonomi ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu sendiri dapat dilihat melalui beberapa indikator, salah satunya dengan pendapatan daerah itu sendiri dan PRDB (Produk Domestik Regional Bruto). Menurut data BPS Kota Semarang 2020, pada tahun 2019 perekonomian Kota Semarang mengalami penguatan atau kenaikan sebesar 6,86% jika dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar 6,52%. Hal ini dapat dilihat dari tabel PRDB Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 2.4

**PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Pada Tahun 2010-2019**

Tahun	PDRB (Rupiah)
2010	80.824.099,97
2011	91.034.098,92
2012	99.755.672,32
2013	108.807.145,40
2014	122.109.871,16
2015	134.205.838,01
2016	147.049.319,76
2017	160.292.032,03
2018	175.223.201,26
2019	191.364.877,11

Sumber : BPS Kota Semarang 2020

Berdasarkan tabel data diatas, PRDB Kota Semarang mengalami kenaikan yang signifikan dari periode tahun 2010 hingga 2019. Peningkatan yang dialami oleh PRDB Kota Semarang ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari nilai barang dan jasa dari setiap jenis lapangan usaha yang ada. Jenis lapangan usaha yang ada di Kota Semarang ini terbagi menjadi 21 jenis kategori lapangan usaha.

Diantaranya ialah adanya Kategori A dimana terdapat Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kategori B yaitu adanya pertambangan dan penggalian, berdasarkan data BPS Kota Semarang 2020 jika dari sisi produksi pertumbuhan perekonomian tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan besaran mencapai 15,77% dibandingkan jenis lapangan usaha lainnya.⁵³ Kategori C yaitu Industri Pengolahan, Kategori D yaitu Pengadaan Listrik dan Gas, Kategori E terdiri dari Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Kategori F terdiri atas Konstruksi, Kategori G yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Kategori H yaitu Transportasi dan Pergudangan. Kategori I yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Kategori J yaitu Informasi dan Komunikasi, Kategori K yaitu Jasa keuangan dan Asuransi, Kategori L mengenai *Real Estate*, Kategori M dan N yaitu Jasa Perusahaan. Sedangkan untuk Kategori O yaitu mengenai Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kategori P dan Q mengenai Jasa Pendidikan dan Kesehatan/Kegiatan Sosial.

⁵³ [https://semarangkota.bps.go.id/pressrelease/2020/03/03/74/ekonomi-kota-semarang-tahun-2019.html#:~:text=Ekonomi%20Kota%20Semarang%20tahun%202019%20tumbuh%206%2C86%20persen%2Cmenguat,\(15%2C77%20persen\)](https://semarangkota.bps.go.id/pressrelease/2020/03/03/74/ekonomi-kota-semarang-tahun-2019.html#:~:text=Ekonomi%20Kota%20Semarang%20tahun%202019%20tumbuh%206%2C86%20persen%2Cmenguat,(15%2C77%20persen).). Diakses pada tanggal 29 Desember 2020, Pukul 18.43

Kategori terakhir yaitu Kategori R,S,T,U merupakan jenis lapangan usaha lainnya.⁵⁴

2.1.5 Visi dan Misi Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang dipimpin oleh seorang walikota dan wakil walikota terpilih yaitu Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti yang menjabat periode tahun 2021-2026 yang mengusung visi dan misi untuk Kota Semarang yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga dari RPJPD Kota Semarang tahun 2005-2025 yaitu :

a) VISI

**“SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT
MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA”**

Visi tersebut memiliki arti yang mengandung bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kota Perdagangan dan Jasa yaitu bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memerhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus

⁵⁴ <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2021/02/26/125/pdrb-kota-semarang-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-2010---2020.html> Diakses pada tanggal 29 Desember 2020, Pukul 18.45

meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PRDB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PRDB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun. Hal-hal tersebut didukung oleh adanya tata kelola birokrasi yang baik yang dilihat melalui peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Sejahtera yaitu bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan Pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan Kesejahteraan Kota Semarang yang Hebat ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

b) MISI

Sedangkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021-2026 dirumuskan terdapat 4 misi pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Upaya dari misi pertama yaitu untuk Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat Pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Misi kedua ini Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

Misi ketiga yaitu Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Misi terakhir ini Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sector ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk

menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan Kawasan berikat, Kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industry kecil dan rumah tangga.

2.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan UU No. 25 Tahun 1999 diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Semarang atau lebih dikenal sebagai DPKAD Kota Semarang yang merupakan organisasi baru hasil penggabungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang (Dipenda) dengan Bagian Keuangan Setda Kota Semarang. Aturan yang mendasari pembentukan organisasi tersebut adalah Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang yang ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang berupa Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 061.1/188/2001 tanggal 25 April 2001. Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Namun perkembangan waktu dan seiring berubahnya peraturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut DPKAD Kota Semarang pada awal tahun 2017, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Sesuai PP No. 18 Tahun 2016.

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang atau BAPENDA memiliki kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mempunyai tugas untuk Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terdiri atas bidang-bidang kerja seperti Pajak Daerah I, Pajak Daerah II, Pendapatan Daerah Bukan Pajak (PDBP), serta Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah (PPPD). Sesuai dengan tugas dan kedudukannya, Pajak Daerah I adalah bidang yang mengurus mengenai pajak bumi dan bangunan daerah perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan untuk Pajak Daerah II adalah bidang yang mengurus pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, dan pajak parkir yang merupakan pajak terbaru. Selain bidang-bidang tersebut, terdapat jabatan fungsional yang merupakan sekelompok jabatan yang berisikan fungsi dan tugas terkait dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian atau kompetensi tertentu.

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sendiri memiliki beberapa wilayah unit tersendiri yang ada di Kota Semarang, diantaranya yaitu :

1. Pos Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I
2. Pos Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II
3. Pos Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III
4. Pos Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV

2.2.1 Visi, dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

a) Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

Visi dan Misi dari Bapenda Kota Semarang merupakan bagian dari Visi dan Misi Walikota Semarang 2021-2026 yaitu "*Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Sejahtera.*" yang capaian sasaran kinerjanya adalah meningkatkan target penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

b) Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

- a) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
- b) Mewujudkan Pemerintah yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan public
- c) Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan
- d) Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan local dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi dari Bapenda Kota Semarang, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memiliki strategi dan kebijakan dalam membantu pembangunan di Pemerintahan Kota Semarang diantaranya yaitu Intensifikasi Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer serta Meningkatkan Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Strategi itu dapat tercapai dengan beberapa kebijakan yang dilakukan yaitu dengan :

- 1) Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bapenda
- 3) Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bapenda
- 4) Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja Bapenda

Hasil dari pencapaian yang telah dicapai oleh Badan Pendapatan Kota Semarang yaitu diantaranya:

- a) Peningkatan Pendapatan Daerah

Tabel 2.5

Peningkatan Pendapatan Daerah

2018	2019	2020
1.844.254.223.815	2.066.323.770.309	2.025.641.644.479

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Berdasarkan pada data yang telah peneliti dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Pendapatan Daerah di Kota Semarang mengalami peningkatan dengan diberlakukannya perubahan pada kualitas pelayanan

- c) Berbagai kegiatan dalam bentuk kerjasama dilakukan oleh Bapenda Kota Semarang agar tercapainya visi dan misi yang selaras dengan Pemerintah Kota Semarang. Kerjasama itu dimulai dengan BPKAD, Bank Jateng, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BPD, Bank BNI, Bank Tabungan Negara serta terciptanya SOP e-SPTPD (elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, SOP e-BPHTB (elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Selain itu juga dalam melakukan peningkatan pelayanan kualitas Bapenda Kota Semarang menciptakan Inovasi melalui berbagai Aplikasi yaitu diantaranya :

Tabel 2.6

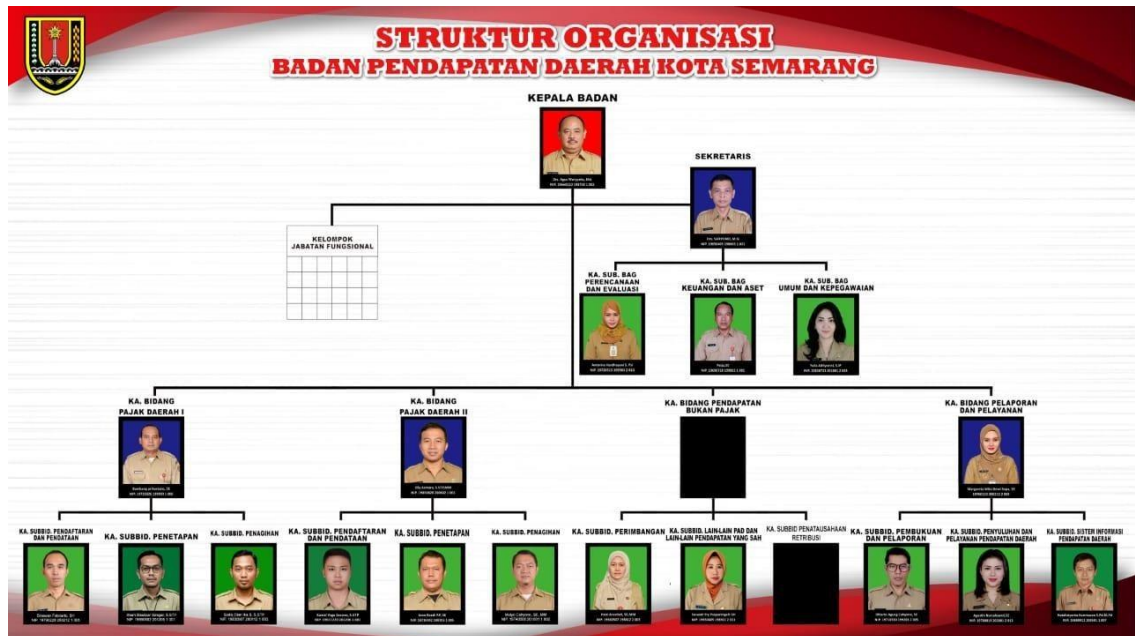
Inovasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

1.	Aplikasi e-Tax Hotel dan Restoran melalui Web Service bagi Wajib Pajak
2.	Aplikasi e-Retribusi bagi Organisasi Perangkat Daerah Penghasil Retribusi
3.	Aplikasi e-SKPD Air Bawah Tanah Bagi Wajib Pajak
4.	Launching Pembayaran PBB melalui Aplikasi GO-PAY
5.	Inovasi Aplikasi LEK PAIJO (Layanan Elektronik Pajak Daerah Sistem Jaringan Online)
6.	Inovasi Aplikasi LONPIA (Layanan Online Pajak Daerah Bagi Anda)

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

2.2.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Gambar 2.2



Sumber: <http://bapenda.semarangkota.go.id/home/>

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pajak Daerah I yang membawahi :
 - a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I;
 - b. Subbidang Penetapan Pajak Daerah I;
 - c. Subbidang Penagihan Pajak Daerah I.
- 4) Bidang Pajak Daerah II, yang membawahi :

- a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II;
 - b. Subbidang Penetapan Pajak Daerah II,
 - c. Subbidang Penagihan Pajak Daerah II
- 5) Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak , yang membawahi :
- a. Subbidang Perimbangan;
 - b. Subbidang lain-lain PAD dan lain-lain Pendapatan yang Sah;
 - c. Subbidang Penatausahaan Retribusi.
- 6) Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, yang membawahi :
- a. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah
 - c. Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

2.3 Gambaran Umum Inovasi LEK PAIJO (Layanan Elektronik Pajak Daerah Sistem Jaringan Online)

Inovasi LEK PAIJO merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 59 Tahun 2018. Inovasi LEK PAIJO itu sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat wajib pajak di Kota Semarang. LEK PAIJO yang berarti Layanan Elektronik Pajak Daerah Sistem Jaringan Online ini memiliki makna yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak tidak lagi secara manual, melainkan dengan adanya system jaringan online. Hal ini tentu membuat pelayanan lebih cepat sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.

Inovasi LEK PAIJO ini pertama kali diresmikan pada tanggal 8 Mei 2019 oleh Bapak Yudi Mardiana selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang menyatakan bahwa inovasi LEK PAIJO ini merupakan *pilot project* yang nantinya akan dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Semarang. Anjungan Mandiri dari LEK PAIJO yang Saat ini baru terdapat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini nantinya juga akan dibangun di setiap kecamatan. Selain itu, peluncuran dari inovasi LEK PAIJO juga dihadiri oleh kehadiran Walikota Semarang yaitu Bapak Hendrar Prihadi, yang ikut serta untuk mengapresiasi dan mendukung peluncuran Inovasi LEK PAIJO ini untuk memudahkan pelayanan kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang.

Dalam peluncuran inovasi LEK PAIJO ini juga memiliki dampak yang positif, hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam peluncuran/peresmian di Kantor Badan Pendapatan Kota Semarang. Hal ini tentu membuat masyarakat wajib pajak memiliki antusiasme yang tinggi. Karena, inovasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi mereka wajib pajak agar dapat mengurus dan mencetak Salinan PBB dan BPHTB secara mandiri tanpa bantuan dari petugas sehingga masyarakat wajib pajak tidak perlu membuang waktu untuk mengantre seperti dahulu, dan bias dilakukan dirumah secara mandiri. Maka dari itu, untuk terus menjaga keberlanjutan dari inovasi LEK PAIJO ini harus tetap dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala.